



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2023**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN**



Nomor : 66.A/LHP/XIX.KUP/04/2024
Tanggal : 30 April 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Jalan W.J. Lalamentik No. 91, Oebobo, Kupang

Telp : (0380) 840605 Email : perwakilan.ntt@bpk.go



Tabel 5.64 Daftar Aset Tetap Tanah per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	318.344.464.584,52			318.344.464.584,52
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	35.061.700.000,00			35.061.700.000,00
3	Dinas Kesehatan	66.249.200.000,00	9.167.478.156,00		75.416.678.156,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	360.918.640.285,70			360.918.640.285,70
5	Dinas Sosial	21.307.665.000,00			21.307.665.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		2.126.250.000,00		2.126.250.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	53.757.954.896,00		2.126.250.000,00	51.631.704.896,00
8	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.532.843.180,00			5.532.843.180,00
9	Dinas Perhubungan	40.817.983.501,00			40.817.983.501,00
10	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.652.500.000,00			4.652.500.000,00
11	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.449.800.000,00		4.000.000.000,00	12.449.800.000,00
12	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	227.676.000.000,00			227.676.000.000,00
13	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.684.511.000,00			4.684.511.000,00
14	Dinas Kelautan dan Perikanan	86.652.207.019,31			86.652.207.019,31
15	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	13.472.490.400,00			13.472.490.400,00
16	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	42.720.582.350,00			42.720.582.350,00
17	Dinas Peternakan	29.574.125.078,52		125.000.000,00	29.449.125.078,52
18	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.531.439.685,00		1.500.000.000,00	31.439.685,00
19	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	20.377.610.000,00			20.377.610.000,00
20	Sekretariat Daerah	276.076.630.000,00		44.798.000.000,00	231.278.630.000,00
21	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	40.333.500.000,00			40.333.500.000,00
22	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.925.000.000,00		1.925.000.000,00	0,00
23	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.253.373.064.138,00	78.113.800.000,00	45.428.588.461,54	1.286.058.275.676,46
24	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.750.000.000,00			1.750.000.000,00
25	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	7.298.400.000,00			7.298.400.000,00
26	Inspektorat Daerah	1.600.000.000,00			1.600.000.000,00
27	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	13.897.314.000,00			13.897.314.000,00
Jumlah		2.946.035.625.118,05	89.407.528.156,00	99.902.838.461,54	2.935.540.314.812,51

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.946.035.625.118,05 maka terjadi kenaikan senilai Rp89.407.528.156,00 dan pengurangan senilai Rp99.902.838.461,54 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai



Rp2.935.540.314.812,51. Terdapat perbedaan senilai Rp47.049.250.000,00 antara mutasi aset tetap tanah secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset tetap tanah di SKPD. Hal ini dikarenakan mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT di mana tanah yang digunakan oleh Pemerintah selaku Pengelola Barang untuk menghasilkan pendapatan melalui KSP dan BGS, sehingga dipindahkan dari SKPD selaku pengguna Barang ke Badan Pendapatan dan Aset Daerah selaku pengelola barang.

Atas aset Tetap Tanah terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Terdapat Aset Tetap Tanah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum dicatat dalam KIB A dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.65 Daftar Tanah pada Sekolah yang Belum Dicatat pada KIB A

No.	Nama Sekolah	Luas Tanah (m ²)	Bukti Kepemilikan Tanah	Tahun Bukti Kepemilikan Tanah
1	SMA Negeri Kotolin	8.669	Sertifikat Hak Pakai No 00012 an Pemerintah Prov NTT	2023
2	SMA Negeri Fatukopa	16.000	BAST Hibah Tanah	2020
3	SMK Negeri Molo Tengah	18.000	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun
4	SMK Negeri 1 Boleng	26.880	BAST Hibah Tanah	2020
5	SMA Negeri 3 Komodo	9.600	BAST Hibah Tanah	2009
6	SMKN Amfoang Selatan	7.028	BAST Hibah Tanah	Tidak ada keterangan tahun

- b) Terdapat sertifikat Tanah milik sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang belum diserahkan atau tidak dikuasai oleh Bidang Aset BPAD dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.66 Daftar Sekolah dengan Sertifikat Tanah yang Belum Diserahkan atau Belum Dikuasai oleh Bidang Aset BPAD

No.	Nama Sekolah	Jenis Bukti	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
1	SMAN 2 Lembor Selatan	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Manggarai Barat	Tidak diketahui
2	SMKN Maritaing	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Alor	Tidak diketahui
3	SMAN 2 Kupang	Salinan sertifikat	Pemerintah Kota Kupang	Tidak diketahui
4	SLBN Kanatang	Salinan sertifikat	Korp Pegawai Republik Indonesia Tingkat II Sumba Timur	Tidak diketahui
5	SMKN 1 Waingapu	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Sumba Timur	Tidak diketahui
6	SMAN 2 Jerebuu	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui
7	SMAN 2 Bajawa	Salinan sertifikat	Pemerintah Kab Ngada	Tidak diketahui



No.	Nama Sekolah	Jenis Bukti	Nama Pemegang Hak Sertifikat	Pemegang Sertifikat Asli
8	SMAN 1 Mauponggo	Salinan sertifikat	Departemen Pendidikan Nasional Indonesia	Tidak diketahui
9	SMAN 9 Kupang	Sertifikat asli	Pemerintah Kota Kupang	SMAN 9 Kupang
10	SMAN 1 Komodo	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Barat	SMAN 1 Komodo
11	SMAN 2 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Timur	SMAN 2 Borong
12	SMKN 1 Borong	Sertifikat asli	Pemerintah Kab Manggarai Timur	SMKN 1 Borong

- c) Terdapat sertifikat tanah pada SMAN 1 Lewa yang masih mengatasnamakan pemilik lama atau belum berpindah ke Pemerintah Provinsi NTT seluas 20.000 m².

2) Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp1.983.477.478.890,68 Rp1.735.225.417.396,36

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp1.983.477.478.890,68 merupakan seluruh peralatan dan mesin yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai, dengan rincian mutasi saldo Aset Tetap sebagai berikut.

Tabel 5.67 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022	1.735.225.417.396,36
2	Penambahan:	265.244.196.417,40
	Belanja Modal TA 2023	193.621.780.165,50
	Utang	77.123.500,00
	Penambahan Utang BLUD RSUD	242.700.000,00
	Koreksi Nilai P2D	559.921.381,00
	Pindah ke Rusak Berat di Dinas Koperasi	60.000.000,00
	Reklas Antar KIB	18.721.939.405,90
	Hibah	51.788.151.965,00
	Koreksi Kurang Catat di Sekretariat Daerah	7.000.000,00
	Reklas dari Barjas	10.710.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Pendidikan	154.870.000,00
3	Pengurangan:	16.992.134.923,08
	Hibah	834.860.000,00
	Reklas Antar KIB	8.243.476.500,00
	Reklas ke Barjas	588.043.235,00
	Koreksi Lebih Catat di BPSDM	90.000.000,00
	Koreksi Lebih Catat di BKD	173.800.000,00
	Koreksi Lebih Catat di Dinas Pendidikan	22.425.000,00
	Kapitalisasi	173.345.050,00
	Penghapusan Aset	2.014.530.902,00
	ATB	142.340.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Utang	470.966.349,00
	Rusak Berat	4.238.347.887,08
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	1.983.477.478.890,68

Tabel 5.68 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin Per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	844.311.038.595,13	144.973.343.135,90	53.425.000,00	989.230.956.731,03
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	247.963.258.939,60	54.325.757.105,00	8.714.566.999,00	293.574.449.045,60
3	Dinas Kesehatan	144.764.561.918,00	1.583.956.379,00	684.675.180,00	145.663.843.117,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	42.960.725.845,00	288.288.564,00	226.600.000,00	43.022.414.409,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	4.048.395.804,00	-	-	4.048.395.804,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	19.758.337.548,00	37.296.000,00	-	19.795.633.548,00
7	Dinas Sosial	13.217.048.435,02	281.745.355,00	257.278.055,00	13.241.515.735,02
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.763.580.759,00	251.671.999,00	-	2.015.252.758,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	55.315.977.308,94	10.451.168.301,00	2.990.000,00	65.764.155.609,94
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	2.642.840.004,00	-	-	2.642.840.004,00
11	Dinas Perhubungan	52.163.818.258,40	39.877.199.205,00	-	92.041.017.463,40
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.671.975.288,99	330.572.999,00	-	8.002.548.287,99
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.854.213.453,00	-	-	5.854.213.453,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.677.768.955,00	-	104.000.000,00	4.573.768.955,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	4.161.301.654,00	160.604.000,00	57.900.000,00	4.264.005.654,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.436.231.614,00	121.904.000,00	266.600.000,00	6.291.535.614,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	28.698.137.728,00	3.954.639.160,00	74.118.180,00	32.578.658.708,00
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.768.796.024,95	-	223.035.000,00	3.545.761.024,95
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	56.617.499.847,00	5.416.255.744,00	394.049.999,00	61.639.705.592,00
20	Dinas Peternakan	9.561.472.929,05	1.685.425.000,00	872.300.000,00	10.374.597.929,05
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	4.471.424.248,00	-	-	4.471.424.248,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.490.278.509,85	493.000.000,00	158.750.000,00	4.824.528.509,85
23	Sekretariat Daerah	56.509.266.962,92	2.595.797.008,50	4.737.818.947,00	54.367.245.024,42
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	20.014.343.039,00	92.823.750,00	5.231.340.000,00	14.875.826.789,00
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4.877.979.273,00	-	-	4.877.979.273,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	50.437.095.381,43	8.281.486.998,00	4.524.477.498,00	54.194.104.881,43
27	Badan Keuangan Daerah	8.315.281.899,00	115.361.190,00	-	8.430.643.089,00
28	Badan Kepegawaian Daerah	7.008.704.608,00	324.659.020,00	-	7.333.363.628,00
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.050.966.267,08	280.433.000,00	1.463.006.315,08	7.868.392.952,00
30	Badan Pengelola Perbatasan	1.715.470.900,00	25.974.000,00	151.028.450,00	1.590.416.450,00
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.412.369.269,00	662.100.000,00	-	6.074.469.269,00
32	Inspektorat Daerah	5.112.025.913,00	15.297.000,00	205.862.796,00	4.921.460.117,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.453.230.217,00	29.125.000,00	-	1.482.355.217,00
Jumlah		1.735.225.417.396,36	276.655.883.913,40	28.403.822.419,08	1.983.477.478.890,68

Berdasarkan saldo awal senilai Rp1.735.225.417.396,36 maka terjadi kenaikan senilai Rp276.655.883.913,40 dan penurunan senilai Rp28.403.822.419,08 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp1.983.477.478.890,68. Terhadap perbedaan senilai Rp11.411.687.496,00 antara mutasi aset tetap Peralatan dan mesin secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Peralatan dan mesin di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD pada Lingkup Pemerintah Provinsi NTT antara lain:

Tabel 5.69 Daftar Aset Tetap Peralatan dan Mesin rekla antar SKPD

No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	220.049.999,00		Mutasi dari BPAD
2	Dinas Perhubungan	209.880.000,00		Mutasi dari BPAD
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	220.049.999,00		Mutasi dari BPAD
4	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	483.000.000,00	220.049.999,00	Mutasi dan Keluar ke BPAD



No.	Nama SKPD	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Keterangan
5	Sekretariat Daerah	2.154.012.500,00	1.575.134.999,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke BPAD
6	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	7.249.209.998,00	4.162.477.498,00	Mutasi Masuk dan Keluar ke SKPD
7	Badan Kepegawaian Daerah	228.685.000,00		Mutasi dari BPAD
8	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	646.800.000,00		Mutasi dari BPAD
9	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		222.685.000,00	Pindah ke BPAD
10	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		5.231.340.000,00	Pindah ke BPAD
Jumlah		11.411.687.496,00	11.411.687.496,00	

Atas Aset Tetap Peralatan dan Mesin terdapat 126 kendaraan dengan Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli pada empat SKPD dikuasai atau disimpan oleh pemakai kendaraan dengan nilai aset Rp14.519.043.235,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.70 BPKB Kendaraan yang Disimpan oleh Pengguna Aset

No	Nama SKPD	Jumlah BPKB	Nilai (Rp)
1	RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang	29	7.927.810.000,00
2	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	57	1.957.660.000,00
3	Dinas PUPR	24	4.319.039.235,00
4	Dinas Peternakan	13	314.534.000,00
Jumlah		123	14.519.043.235,00

3) Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Rp2.461.271.590.017,84 Rp2.297.838.521.596,67

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp2.461.271.590.017,84 merupakan seluruh gedung dan bangunan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.71 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022	2.297.838.521.596,67
2	Penambahan:	311.286.161.392,14
	Belanja Modal TA 2023	248.250.770.111,00
	Reklas Antar KIB	9.944.170.171,00
	Hibah dari Kementerian	6.106.672.000,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	1.460.378.000,00
	Kapitalisasi	45.524.171.110,14
3	Pengurangan:	147.853.092.970,97
	Koreksi lebih Catat	45.524.171.110,14



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Rusak Berat	1.244.618.000,00
	Reklas Antar KIB	48.977.866.889,90
	Reklas dari Barjas	802.922.900,00
	Reklas ke KSP dan BGS dari Dinas Peternakan	1.606.923.000,00
	Koreksi Nilai Aset berdasarkan LHP BPK di Dinas PUPR	765.758.522,13
	Reklas ke Properti Investasi	13.537.438.638,80
	Reklas ke KDP di Dinas Pendidikan	35.393.393.910,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	2.461.271.590.017,84

Tabel 5.72 Daftar Aset Tetap Gedung dan Bangunan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.203.980.613.361,44	210.424.600.053,00	60.673.692.615,90	1.353.731.520.798,54
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	102.220.222.352,00	9.441.853.325,00	8.096.038.745,00	103.566.036.932,00
3	Dinas Kesehatan	82.926.439.677,85	1.128.033.670,00	4.768.552.657,40	79.285.920.690,45
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	160.094.019.930,00	45.563.727.110,14	765.758.522,13	204.891.988.518,01
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana	3.975.967.426,00	-	-	3.975.967.426,00
7	Dinas Sosial	40.947.436.230,79	403.997.637,00	242.457.600,00	41.108.976.267,79
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	-	261.389.151,00	-	261.389.151,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	50.439.900.926,50	2.087.556.000,00	1.049.291.082,24	51.478.165.844,26
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	5.709.037.831,00	-	395.642.200,00	5.313.395.631,00
11	Dinas Perhubungan	28.058.841.883,85	4.728.757.339,00	4.728.757.339,00	28.058.841.883,85
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.102.170.000,00	-	-	2.102.170.000,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.173.048.924,00	-	-	12.173.048.924,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.261.199.025,00	-	45.426.920,00	17.215.772.105,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	30.790.589.176,51	-	725.442.983,77	30.065.146.192,74
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.530.260.000,00	-	2.817.507.560,00	6.712.752.440,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	55.417.240.151,04	19.957.050.000,00	18.247.750.000,00	57.126.540.151,04
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	38.241.823.611,29	-	74.144.000,00	38.167.679.611,29
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	33.552.562.060,41	13.443.304.000,00	1.989.170.617,19	45.006.695.443,22
20	Dinas Peternakan	41.455.935.592,00	3.854.643.005,00	1.743.770.720,00	43.566.807.877,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	10.758.858.946,00	-	-	10.758.858.946,00
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	12.421.901.554,00	-	1.099.227.600,00	11.322.673.954,00
23	Sekretariat Daerah	224.644.367.364,00	-	19.500.000,00	224.624.867.364,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	26.310.132.230,00	-	15.438.659.556,53	10.871.472.673,47
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	1.617.412.250,00	-	409.657.550,00	1.207.754.700,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	61.758.249.610,99	1.662.953.253,00	22.643.490.605,59	40.777.712.258,40
27	Badan Keuangan Daerah	-	-	-	-
28	Badan Kepegawaian Daerah	-	-	-	-
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.970.697.400,00	196.609.000,00	2.729.458.564,00	14.437.847.836,00
30	Badan Pengelola Perbatasan	183.634.000,00	-	-	183.634.000,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	12.667.830.126,00	-	988.882.683,22	11.678.947.442,78
32	Inspektorat Daerah	10.226.111.836,00	-	-	10.226.111.836,00
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.402.018.120,00	-	29.125.000,00	1.372.893.120,00
Jumlah		2.297.838.521.596,67	313.154.473.543,14	149.721.405.121,97	2.461.271.590.017,84

Berdasarkan saldo awal senilai Rp2.297.838.521.596,67 maka terjadi kenaikan senilai Rp313.154.473.543,14 dan penurunan senilai Rp149.721.405.121,97 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp2.461.271.590.017,84.

Terhadap perbedaan senilai (Rp1.868.312.151,00) antara mutasi aset tetap Gedung dan Bangunan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Gedung dan Bangunan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Dinas Peternakan yang diserahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah ke Dinas Peternakan berupa 20 Unit Gedung di Sumba Timur yang dipindahkan ke Pengelola Barang untuk di Kerjasamakan dengan Pihak Ketiga senilai Rp1.606.923.000,00 dan mutasi dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp261.389.151,00 berupa Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen, pagar permanen dan gedung garasi.

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp6.819.220.982.207,81 **Rp6.509.714.653.635,49**

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp6.819.220.982.207,81 merupakan seluruh jalan, irigasi dan jaringan yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Provinsi NTT yang mencakup seluruh jalan, jembatan, irigasi dan jaringan dalam kondisi dipakai dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.73 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2022	6.509.714.653.635,49
2	Penambahan:	320.913.524.383,45
	Belanja Modal TA 2023	155.271.232.138,00
	Reklas Antar KIB	100.369.346.959,00
	Koreksi Tambah Aset dari Bunga	62.884.046.386,00
	Kapitalisasi Bunga di Dinas PUPR	2.125.623.660,44
	Kapitalisasi di Dinas PUPR	263.275.240,01
3	Pengurangan:	11.407.195.811,13
	Reklas antar KIB	5.885.282.200,00
	Reklas ke Barjas	365.972.900,00
	Reklas ke Barjas di Dinas PUPR	1.024.047.372,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke KSP dan BGS dari Dinas Peternakan	337.947.500,00
	Koreksi Kurang	263.275.240,01
	Koreksi Nilai Aset berdasarkan LHP BPK di Dinas PUPR	3.530.670.599,12
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	6.819.220.982.207,81

Tabel 5.74 Daftar Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.073.862.438,00	87.499.700,00	-	8.161.362.138,00
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	8.030.778.858,00	348.305.000,00	7.799.200,00	8.371.284.658,00
3	Dinas Kesehatan	5.104.032.616,00	-	-	5.104.032.616,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	6.357.388.267.475,23	293.109.535.424,45	10.638.985.071,12	6.639.858.817.828,56
5	Satuan Polisi Pamong Praja	10.000.000,00	-	-	10.000.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	138.819.750,00	-	-	138.819.750,00
7	Dinas Sosial	1.532.306.500,00	-	-	1.532.306.500,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	30.495.000,00	101.283.140,00	-	131.778.140,00
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	8.117.787.367,00	-	101.283.140,00	8.016.504.227,00
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	128.638.864,00	-	-	128.638.864,00
11	Dinas Perhubungan	40.704.930.248,00	4.728.757.339,00	41.391.705,80	45.392.295.881,20
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	86.950.250,00	-	-	86.950.250,00
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	960.835.350,00	-	-	960.835.350,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	916.714.775,00	45.426.920,00	-	962.141.695,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	104.125.000,00	-	-	104.125.000,00
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	189.757.950,00	-	-	189.757.950,00
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	17.156.902.022,00	22.594.000.000,00	91.207.333,33	39.659.694.688,67
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	6.322.248.234,76	-	-	6.322.248.234,76
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	3.904.024.918,00	-	-	3.904.024.918,00
20	Dinas Peternakan	6.591.049.394,00	-	337.947.500,00	6.253.101.894,00
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	34.565.181.944,50	-	-	34.565.181.944,50
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.290.400,00	-	-	269.290.400,00
23	Sekretariat Daerah	3.293.162.783,00	-	-	3.293.162.783,00
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	532.859.343,00	-	623.861,08	532.235.481,92
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	230.900.000,00	-	-	230.900.000,00
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	1.989.548.239,00	337.947.500,00	435.080.332,09	1.892.415.406,91
27	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.162.862.800,00	-	166.988.000,00	1.995.874.800,00



No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
28	Badan Pengelola Perbatasan	9.470.867,00	-	-	9.470.867,00
29	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	589.564.800,00	-	25.120.307,71	564.444.492,29
30	Inspektorat Daerah	514.088.164,00	-	-	514.088.164,00
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	65.197.285,00	-	-	65.197.285,00
Jumlah		6.509.714.653.635,49	321.352.755.023,45	11.846.426.451,13	6.819.220.982.207,81

Berdasarkan saldo awal senilai Rp6.509.714.653.635,49 maka terjadi kenaikan senilai Rp321.352.755.023,45 dan penurunan senilai Rp11.846.426.451,13 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp6.819.220.982.207,81.

Terhadap perbedaan senilai Rp439.230.640,00 antara mutasi aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan secara keseluruhan dengan penambahan/pengurangan aset Jalan, Irigasi dan Jaringan di SKPD, dapat dijelaskan bahwa terdapat mutasi masuk dan keluar antar SKPD yakni dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak senilai Rp101.283.140,00 berupa Instalasi Air dan Bak Penampung, serta Dinas Peternakan yang diserahkan Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa Jaringan di Sumba Timur yang dipindahkan ke Pengelola Barang untuk di Kerjasamakan dengan Pihak Ketiga senilai Rp337.947.500,00.

5) Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp245.951.097.870,39	Rp222.888.117.017,39

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp245.951.097.870,39 mengalami kenaikan senilai Rp23.062.980.853,00 dari tahun sebelumnya senilai Rp222.888.117.017,39 mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.75 Rincian Mutasi Saldo Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022	222.888.117.017,39
2	Penambahan:	24.555.241.271,00
	Belanja Modal TA 2023	24.198.241.271,00
	Koreksi Kurang Catat di Dinas Peternakan	345.000.000,00
	Reklas dari Persediaan di Dinas Peternakan	12.000.000,00
3	Pengurangan:	1.492.260.418,00
	Koreksi Kurang Ternak Mati dan Jual di Dinas Peternakan	1.298.945.607,00
	Reklas Antar KIB	178.604.000,00
	Penghapusan di Sekda	7.799.100,00
	Kapitalisasi di Dinas Kelautan	4.000.000,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Reklas ke Barang dan Jasa di Dinas PTSP	2.911.711,00
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2+3)	245.951.097.870,39

Tabel 5.76 Daftar Aset Tetap Lainnya per SKPD

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	203.314.197.179,99	22.954.541.732,00	-	226.268.738.911,99
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	92.490.480,40	-	-	92.490.480,40
3	Dinas Kesehatan	190.951.000,00	7.500.000,00	-	198.451.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	232.052.800,00	718.087.038,00	-	950.139.838,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.985.000,00	-	-	1.985.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana	1.496.300,00	-	-	1.496.300,00
7	Dinas Sosial	505.604.000,00	-	-	505.604.000,00
8	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	6.311.559.829,00	-	-	6.311.559.829,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	11.956.700,00	-	-	11.956.700,00
10	Dinas Perhubungan	485.182.000,00	-	-	485.182.000,00
11	Dinas Komunikasi dan Informatika	149.261.700,00	-	18.000.000,00	131.261.700,00
12	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.221.000,00	-	-	162.221.000,00
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.482.000,00	-	-	7.482.000,00
14	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	160.604.000,00	-	160.604.000,00	-
15	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	4.632.261.807,00	515.200.790,00	-	5.147.462.597,00
16	Dinas Kelautan dan Perikanan	456.743.500,00	-	4.000.000,00	452.743.500,00
17	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	294.900.000,00	-	-	294.900.000,00
18	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	48.391.300,00	-	-	48.391.300,00
19	Dinas Peternakan	2.701.153.271,00	357.000.000,00	1.298.945.607,00	1.759.207.664,00
20	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	1.605.932.600,00	-	-	1.605.932.600,00
21	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00
22	Sekretariat Daerah	314.296.950,00	-	7.799.100,00	306.497.850,00
23	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	119.112.000,00	-	-	119.112.000,00
24	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	517.111.900,00	-	-	517.111.900,00
25	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	243.149.400,00	-	-	243.149.400,00
26	Badan Keuangan Daerah	10.391.000,00	-	-	10.391.000,00
27	Badan Kepegawaian Daerah	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
28	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	120.318.400,00	-	-	120.318.400,00
29	Badan Pengelola Perbatasan	10.180.900,00	-	-	10.180.900,00
30	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	182.130.000,00	-	-	182.130.000,00
Jumlah		222.888.117.017,39	24.552.329.560,00	1.489.348.707,00	245.951.097.870,39



Atas nilai Aset Tetap Lainnya terdapat informasi sebagai berikut :

- a) Aset Tetap Lainnya berupa buku pada lima sekolah tidak dapat diketahui keberadaannya senilai Rp9.858.250,00 dikarenakan sekolah belum melakukan penatausahaan buku secara tertib, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.77 Daftar Sekolah yang Belum Melakukan Penatausahaan Buku Secara Tertib

No.	Nama Sekolah	Kuantitas	Nilai (Rp)
1	SMA N 1 Amarasi Selatan	11	719.000,00
2	SMA N 2 Amarasi Selatan	30	2.745.000,00
3	SMA N 2 Kupang Barat	32	4.355.000,00
4	SMK N 1 Welak	9	1.115.000,00
5	SMA N 2 Kupang	6	884.250,00
Jumlah		88	9.818.250,00

- b) Terdapat Aset Tetap Lainnya berupa Hewan Ternak yang dicatat pada Instalasi Lili UPTD Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak (PTPPT) Dinas Peternakan yaitu 33 ekor Sapi Bali yang keberadaannya tidak berada pada Instalasi Lili namun pada mitra kerja sama sesuai dengan Perjanjian Kemitraan dengan Petani Mitra tetapi telah berakhir pada tahun 2019 dan tidak dilakukan perpanjangan. Atas hal tersebut belum diputuskan keberlanjutan atau pengakhiran sistem kemitraan yang perjanjiannya telah berakhir pada tahun 2019 sehingga hewan ternak sapi sudah tidak lagi menjadi obyek perjanjian.

6) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Dalam Pengerjaan	Rp185.895.865.804,05	Rp221.575.002.029,50

Saldo Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai Rp185.895.865.804,05 mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya, dengan rincian mutasi sebagai berikut.

Tabel 5.78 Rincian Mutasi Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2022	221.575.002.029,50
2	Penambahan:	43.692.720.145,55
	Reklas Antar KIB	41.901.839.144,84
	Kapitalisasi Bunga dan Biaya Pengelolaan di Dinas PUPR	1.111.023.360,71
	Koreksi Nilai Ekuitas di Dinas PUPR	215.228.990,00
	Utang di Dinas PUPR	464.628.650,00
3	Pengurangan:	79.371.856.371,00
	Reklas Antar KIB	79.371.856.371,00



No.	Uraian	Nilai (Rp)
4	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	185.895.865.804,05

**Tabel 5.79 Daftar Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
per SKPD**

No.	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.891.722.136,10	6.325.653.400,00	-	26.217.375.536,10
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	-	1.577.681.825,00	-	1.577.681.825,00
3	Dinas Kesehatan	2.139.979.428,00	-	-	2.139.979.428,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	170.514.458.045,40	35.789.384.920,55	77.310.357.700,00	128.993.485.265,95
5	Badan Penanggulangan Bencana	97.800.000,00	-	-	97.800.000,00
6	Dinas Sosial	772.766.000,00	-	-	772.766.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	3.470.287.492,00	-	-	3.470.287.492,00
8	Dinas Perhubungan	2.000.000,00	-	-	2.000.000,00
9	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.056.374.000,00	-	-	1.056.374.000,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	2.411.235.000,00	-	-	2.411.235.000,00
11	Dinas Kelautan dan Perikanan	301.570.000,00	-	-	301.570.000,00
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	28.094.000,00	-	-	28.094.000,00
13	Dinas Peternakan	2.061.498.671,00	-	2.061.498.671,00	-
14	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	865.597.060,00	-	-	865.597.060,00
15	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.589.000.000,00	-	-	1.589.000.000,00
16	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-
17	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	908.098.297,00	-	-	908.098.297,00
18	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	15.464.521.900,00	-	-	15.464.521.900,00
Jumlah		221.575.002.029,50	43.692.720.145,55	79.371.856.371,00	185.895.865.804,05

Berdasarkan saldo awal senilai Rp221.575.002.029,50 maka terjadi kenaikan senilai Rp43.692.720.145,55 dan penurunan senilai Rp79.371.856.371,00 sehingga saldo akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp185.895.865.804,05. Atas saldo akhir, terdapat informasi sebagai berikut.

- a) Pembangunan Gelanggang Pemuda senilai Rp13.390.000.000,00 di atas lahan milik Pemerintah Provinsi NTT. Kegiatan tersebut dibiayai dari dana APBN senilai Rp10.390.000.000,00 dan APBD Provinsi NTT Senilai Rp3.000.000.000,00 yang dibelanjakan pada tahun 2013 melalui SP2D Nomor 281/1.20.00/SP2D/LS/2013 tanggal 11 Maret 2013 yang dicatat sebagai belanja hibah kepada Komite Pembangunan GOR. Pembangunan GOR Oepoi tersebut mangkrak dan belum dilanjutkan kembali sehingga belum dicatat sebagai Aset Tetap KDP karena belum ada Dokumen resmi. Selama tahun 2022,



Pemerintah Provinsi NTT masih terus berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

- b) Rehabilitasi Stadion Oepoi yang pada awalnya dibangun di tahun 2017 s.d. 2018 belum selesai. Pada tahun 2020 Stadion Oepoi dilanjutkan pembangunannya melalui belanja APBN Kementerian PUPR. Per 31 Desember 2020 telah dilakukan *Provisional Hand Over* (PHO) terhadap pekerjaan Tahap I, dengan rincian pekerjaan berupa rehabilitasi tribun utama, pembangunan tribun, dan penanaman rumput pada lapangan sepak bola. Tambahan rehabilitasi Stadion Oepoi tersebut masih belum dicatat dan dimanfaatkan karena belum ada serah terima sampai 31 Desember 2023.
- c) Pembangunan Fasilitas Pameran Kawasan NTT Fair per 31 Maret 2019 progres fisik sudah mencapai 67,721%. Sampai dengan akhir tahun periode pelaporan pembangunan tersebut belum dilanjutkan.
- d) Pembangunan Tahap I Monumen Pancasila sampai dengan Juni 2019 sudah mencapai 87%. Pembangunan tersebut belum dilanjutkan.

7) Akumulasi Penyusutan

Akumulasi 31 Desember 2023 31 Desember 2022
Penyusutan (Rp5.322.782.132.401,36) (Rp4.089.662.437.531,20)

Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 yang disajikan senilai (Rp5.322.782.132.401,36) dimana mengalami kenaikan senilai (Rp1.233.119.694.870,16) dari tahun sebelumnya senilai (Rp4.089.662.437.531,20) yang mencakup akumulasi penyusutan aset tetap peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.80 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.525.419.598.594,52)	(1.116.560.510.992,76)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(562.369.523.520,36)	(446.914.922.049,22)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(3.234.315.668.286,48)	(2.525.428.314.089,22)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(677.342.000,00)	(758.690.400,00)
Jumlah	(5.322.782.132.401,36)	(4.089.662.437.531,20)

Tabel 5.81 Rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022	(4.089.662.437.531,20)
2	Penambahan:	(1.276.020.720.747,69)
	Beban Penyusutan 2023	(645.313.209.123,18)
	Reklas Antar KIB	(25.040.192,00)



No.	Uraian	Nilai (Rp)
	Koreksi kurang Catat	(15.781.010.428,09)
	Koreksi lebih catat di Dinas Pendidikan	(152.670.000,00)
	Pengakuan Aset di RSUD	(48.540.000,00)
	Koreksi akumulasi penyusutan aset induk sebelum kapitalisasi aset rehabilitasi Gedung dan Bangunan	(33.938.764.568,56)
	Koreksi akibat perubahan Kebijakan	(580.758.244.435,86)
	Kapitalisasi	(2.142.000,00)
	LHP Inspektorat pada Dinas Pendidikan	(1.100.000,00)
3	Pengurangan:	(42.901.025.877,53)
	ATB	(68.180.000,00)
	Reklas Antar KIB	(25.040.192,00)
	Koreksi Lebih catat	(35.291.290.256,38)
	Penghapusan	(2.014.530.902,00)
	Reklas ke Rusak Berat	(2.686.938.045,08)
	Pengakuan Aset Properti Investasi	(2.767.119.717,18)
	Koreksi atas lebih catat akumulasi penyusutan aset JIJ pada Dinas Penanaman Modal Satu Pintu	(33.440.514,89)
	Koreksi Lebih Catat Dinas Pendidikan	(14.486.250,00)
4	Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 (1+2-3)	(5.322.782.132.401,36)

Tabel 5.82 Daftar Saldo Akumulasi Penyusutan Per SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(679.835.932.908,51)	(324.106.753.051,94)	(21.388.965,64)	(1.003.921.296.994,81)
2	RSU Prof. Dr. W.Z. Johannes	(202.627.634.507,73)	(52.702.915.998,83)	-	(255.330.550.506,56)
3	Dinas Kesehatan	(112.174.693.303,83)	(36.973.089.686,03)	(330.000.000,00)	(148.817.782.989,86)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	(2.550.136.037.944,65)	(708.746.005.543,63)	(666.268.780,16)	(3.258.215.774.708,12)
5	Satuan Polisi Pamong Praja	(2.465.474.201,60)	(658.804.452,42)	-	(3.124.278.654,02)
6	Badan Penanggulangan Bencana	(19.458.950.353,10)	(1.053.152.876,46)	-	(20.512.103.229,56)
7	Dinas Sosial	(30.995.874.552,96)	(2.555.801.557,97)	(45.000.000,00)	(33.506.676.110,93)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	(1.419.653.679,28)	(708.467.461,20)	-	(2.128.121.140,48)
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	(58.706.330.507,94)	(10.601.252.909,89)	(239.003.712,06)	(69.068.579.705,77)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	(3.611.224.072,52)	(424.010.708,65)	-	(4.035.234.781,17)
11	Dinas Perhubungan	(56.017.162.347,30)	(8.857.586.531,71)	-	(64.874.748.879,01)
12	Dinas Komunikasi dan Informatika	(8.465.756.325,24)	(1.151.913.703,00)	(18.000.000,00)	(9.599.670.028,24)
13	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(10.531.299.443,15)	(911.756.378,28)	(26.403.400,00)	(11.416.652.421,43)
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(6.599.266.901,58)	(1.051.473.313,33)	(89.460.817,42)	(7.561.279.397,49)
15	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	(5.604.717.287,42)	(2.995.233.620,88)	-	(8.599.950.908,30)
16	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	(8.991.548.662,68)	(1.285.610.780,44)	(303.545.000,00)	(9.973.614.443,12)



No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Berkurang (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)
17	Dinas Kelautan dan Perikanan	(30.380.156.630,57)	(9.847.582.586,37)	(24.613.660,27)	(40.203.125.556,67)
18	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	(9.373.399.209,26)	(5.557.988.011,63)	(222.755.000,00)	(14.708.632.220,89)
19	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	(39.957.366.363,77)	(18.003.987.703,77)	(1.267.023.279,00)	(56.694.330.788,54)
20	Dinas Peternakan	(20.887.484.164,94)	(4.401.000.904,37)	(1.155.698.334,58)	(24.132.786.734,73)
21	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	(17.651.528.797,99)	(2.719.020.617,82)	-	(20.370.549.415,81)
22	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(8.141.504.220,79)	(989.571.588,49)	(158.750.000,00)	(8.972.325.809,28)
23	Sekretariat Daerah	(85.849.749.806,42)	(17.612.524.403,83)	(1.636.013.819,28)	(101.826.260.390,97)
24	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	(30.162.874.056,06)	(3.364.421.777,85)	(4.270.761.428,57)	(29.256.534.405,34)
25	Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.645.257.361,18)	(953.366.152,11)	-	(5.598.623.513,29)
26	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	(47.469.709.921,94)	(21.172.104.206,24)	(6.261.575.705,53)	(62.380.238.422,65)
27	Badan Keuangan Daerah	(6.029.744.017,94)	(1.620.175.861,87)	-	(7.649.919.879,81)
28	Badan Kepegawaian Daerah	(3.690.179.286,60)	(2.556.403.471,80)	-	(6.246.582.758,40)
29	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(12.965.343.084,98)	(2.816.875.997,77)	(1.506.833.815,08)	(14.275.385.267,67)
30	Badan Pengelola Perbatasan	(1.536.230.019,79)	(160.854.080,30)	(151.028.450,00)	(1.546.055.650,09)
31	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	(8.223.789.000,54)	(2.975.770.261,20)	-	(11.199.559.261,74)
32	Inspektorat Daerah	(2.813.159.648,14)	(1.824.341.699,56)	(210.281.928,80)	(4.427.219.418,90)
33	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.243.404.940,80)	(364.283.066,91)	-	(2.607.688.007,71)
Jumlah		(4.089.662.437.531,20)	(1.251.724.100.966,55)	(18.604.406.096,39)	(5.322.782.132.401,36)

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada **Lampiran N.14** dan **N.15** sedangkan Rincian Lengkap Aset yang berasal dari Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran N.14.1**.

d. Properti Investasi

Properti Investasi

31 Desember 2023
Rp22.933.168.921,62

31 Desember 2022
Rp0,00

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset. Saldo Properti Investasi Pemerintah provinsi NTT per 31 Desember 2023 senilai Rp25.700.288.638,80 serta terdapat Akumulasi Penyusutan senilai Rp2.767.119.717,18 sehingga nilai buku Properti Investasi setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan adalah Rp22.933.168.921,62 (Rp25.700.288.638,00 – Rp2.767.119.717,18) dimana pada tahun sebelumnya nilai Properti Investasi adalah Rp0,00, yang dapat diuraikan lebih lanjut pada tabel berikut.

Tabel 5.83 Properti Investasi dan Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
1	Properti Investasi	25.700.288.638,80	0,00
2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	(2.767.119.717,18)	0,00



No.	Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
	Jumlah	22.933.168.921,62	0,00

Properti Investasi terdiri atas enam aset yang dikelola oleh Badan Pendapatan dan Aset Daerah (BPAD) Provinsi NTT dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.84 Rincian Properti Investasi

No.	SKPD	Nilai Perolehan Properti Investasi	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	Nilai Buku Properti Investasi	Keterangan
Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT					
a	Tanah Kosong Yang Sudah Diperuntukkan	6.824.100.000,00		6.824.100.000,00	Tanah Belakang Hotel Cendana
b	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1.830.000.000,00		1.830.000.000,00	Tanah Bangunan Gedung Bank Bukopin (Eks. Gedung Ade Irma)
c	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	3.508.750.000,00		3.508.750.000,00	Tanah Ruko Frienship (Eks Taman APDN)
d	Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen	8.098.267.575,20	2.105.549.569,55	5.992.718.005,65	Gedung Pertokoan/Koperasi/ Pasar Permanen Ruko Frienship
e	Pagar Permanen	147.827.000,00	26.608.860,00	121.218.140,00	Pemagaran Ruko Frienship
f	Bangunan Gedung Kuliner Permanen	5.291.344.063,60	634.961.287,63	4.656.382.775,97	Bangunan Ruko Kawasan Wisata Kuliner Lokasi I Oipoi
Jumlah		25.700.288.638,80	2.767.119.717,18	22.933.168.921,62	

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.16**

e. Dana Cadangan

Dana Cadangan	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp211.429.551.796,31	Rp101.018.749.999,69

Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp211.429.551.796,31 merupakan dana yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2024. Saldo Dana Cadangan pada Tahun 2023 senilai Rp211.429.551.796,36 di mana terdapat peningkatan senilai Rp110.410.801.796,67 dari tahun sebelumnya senilai Rp101.018.749.999,69. Dana Cadangan pada Tahun 2023 terdiri dari Dana Cadangan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp203.511.200.000,00 ditambah Jasa Giro senilai Rp25.643.463g,39 dan bunga Deposito senilai Rp7.892.708.332,92.

Rincian Lengkap Aset Tetap dilihat pada **Lampiran N.17**.



f. Aset Lainnya

Aset Lainnya	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp393.018.493.957,97	Rp373.972.116.462,34

Aset Lainnya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 senilai Rp393.018.493.957,97 dimana mengalami peningkatan senilai Rp19.046.377.495,63 dari tahun sebelumnya senilai Rp373.972.116.462,34. Aset Lainnya adalah aset selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan piutang jangka panjang, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.85 Rincian Aset Lainnya Tahun 2023

No	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan) (Rp)
1	2	3	4	5=3-4
1	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	53.578.121.184,88	35.243.950.000,00	18.334.171.184,88
2	Aset Tidak Berwujud	15.317.022.173,00	15.174.682.173,00	142.340.000,00
3	Aset Lain - Lain	338.126.806.131,20	330.225.552.209,65	7.901.253.921,55
4	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(14.003.455.531,11)	(6.672.067.920,31)	(7.331.387.610,80)
	Jumlah	393.018.493.957,97	373.972.116.462,34	19.046.377.495,63

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan Pihak Ketiga	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp53.578.121.184,88	Rp35.243.950.000,00

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp 53.578.121.184,88 merupakan nilai bersih dari Aset Tetap Tanah senilai Rp54.759.930.961,54 dan Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023 senilai Rp1.181.809.776,66. Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2022 senilai Rp35.243.850.000,00, di mana terdapat kenaikan nilai Bersih atas Kemitraan dengan Pihak Ketiga senilai Rp18.334.271.184,88 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana kenaikan signifikan karena adanya penambahan Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Badan Pendapatan Aset Daerah kepada PT Komodo Kawisata Paratama dan PT Asiabeef Biofarm Indonesia. Aset Lainnya Kemitraan dengan Pihak Ketiga merupakan Saldo Aset Tetap Tanah yang dialihkan menjadi Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak Ketiga) akibat adanya Kerjasama Pemanfaatan Aset milik Pemerintah Provinsi NTT dengan jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun, rincian sebagai berikut.

- PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/80/BPAD/2019 tanggal 26 Agustus 2019 dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 18.214 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: SU No.15/1983, HPL1/1984 dengan Nilai Tanah senilai Rp3.642.800.000,00;
- PT Sarana Investama Manggabar sesuai kontrak Nomor: HK.530 Tahun 2014 tanggal 23 Mei 2014 dengan pola Bangun Guna Serah



(BGS), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah $\pm 31.670 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00. Namun, atas kerja sama dengan PT Sarana Investama Manggabar sudah dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). PT Sarana Investama Manggabar telah memiliki sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dengan jangka waktu 30 tahun, dan terkait kerja sama ini masih dalam proses untuk diselesaikan melalui peradilan. Kerja sama ini kemudian digantikan dengan mitra baru yaitu PT Flobamor sesuai kontrak Nomor: BU.030/156/BPAD/2020 dan 004/FLB/PKS dengan pola KSP (Kerjasama Pengelolaan), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 31.670 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HPL Nomor 2/2016 dengan Nilai Tanah senilai Rp1.266.800.000,00;

- c) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov NTT yang terletak di Pulau Purung Ds. Warloka, Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat, sertifikat Nomor HPL.00004/2023 tanggal 24 November 2023 oleh PT Komodo Kawisata Pratama dengan Nomor: BU.000.2.3.2/168/BPAD/2023 dan Nomor: 027/KKP-PNTT/HPL/VIII/2023 tentang Pemberian Kewenangan oleh Negara kepada Pemerintah Provinsi NTT untuk Pengelolaan selama 50 tahun sejak tanggal 31 Agustus 2023 dan berakhir pada 30 Agustus 2073 senilai Rp17.496.172.000,00;
- d) Kerjasama Pemanfaatan Tanah Milik Pemprov NTT yang terletak di Desa Kabar, Kec. Rindi Kab. Sumba Timur, sertifikat Nomor: 00002/2023 tanggal 13 Juli 2023 oleh PT Asiabief Biofarm Indonesia dengan Nomor : BU.030/80/BPAD/2023 dan Nomor : S.PMH/LGL-ABI/III/006/23 selama 30 tahun dengan status tanah yakni Hak Pakai berupa Tanah Peternakan dan Tanah Mess di kabar senilai Rp74.938.461,54 dan 20 (dua puluh) unit Gedung dan Bangunan Mess senilai Rp1.606.923.000,00 dan Jaringan Rumah Tangga senilai Rp337.947.500,00 dengan jangka waktu pengelolaan selama 30 tahun sejak tanggal 13 Juli 2023 dan berakhir pada 13 Juli 2053; dan
- e) Kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten TTS Nomor: PEM.415.4.43/II/72/XII/2021 tentang Pengelolaan Pariwisata *Estate* di Fatumnasi Kabupaten TTS senilai Rp2.183.000.000,00.

Aset lainnya berupa kemitraan dengan pihak ketiga akibat adanya sewa aset tanah milik Pemerintah Provinsi NTT senilai Rp28.151.350.000,00 dengan pola BGS, jangka waktu lebih dari 20 (dua puluh) tahun dengan rincian sebagai berikut.

- a) PT Nusa Bahana Niaga sesuai kontrak Nomor: HK 34 Tahun 2016 tanggal 5 Desember 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 25 tahun, luas Tanah $\pm 60.060 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah



Nomor: HP.14/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp26.424.000.000,00;

- b) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 1.710 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp256.500.000,00;
- c) PT Suba Suka GO sesuai kontrak Nomor: HK 18 Tahun 2016 dan Nomor 36/556/PBG/IX/2016, tanggal 16 September 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 6.595 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: 8/1999 dengan Nilai Tanah senilai Rp989.250.000,00; dan
- d) PT Inspirasi Investama Raya sesuai kontrak Nomor: HK.01 Tahun 2016 dan Nomor 20/IIR/PKS/I/2016 tanggal 20 Januari 2016 dengan pola BGS (Bangun Guna Serah), masa kontrak 30 tahun, luas Tanah $\pm 12.040 \text{ m}^2$, sertifikat Tanah Nomor: HP 11/2000 dengan Nilai Tanah senilai Rp481.600.000,00.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.18, N.18.1 dan N.18.2.**

2) Aset Tak Berwujud

Aset Tak Berwujud	<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
	Rp1.313.566.641,89	Rp8.502.614.252,69

Saldo Aset Tak Berwujud tahun 2023 senilai Rp1.313.566.641,89 terdiri saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud senilai Rp15.317.022.173,00 terdiri dari Saldo Awal Aset Tak Berwujud senilai Rp15.174.682.173,00 ditambah Aset Tak Berwujud Tahun 2023 senilai Rp142.340.000,00 dikurangi Akumulasi Amortisasi senilai (Rp14.003.455.531,11) dan saldo Aset Tak Berwujud tahun 2022 senilai Rp8.502.614.252,69 merupakan saldo nilai perolehan Aset Tak Berwujud senilai Rp15.174.682.173,00 dikurangi saldo Akumulasi Amortisasi tahun 2022 senilai (Rp6.672.067.920,31). Terdapat penurunan saldo Aset Tak Berwujud secara signifikan senilai (Rp7.189.047.610,80) dikarenakan terdapat penyesuaian masa manfaat aset mengikuti dengan kebijakan akuntansi. Rincian penambahan Aset Tak Berwujud pada SKPD dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.86 Aset Tak Berwujud SKPD

No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi	Nilai Buku
1	RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes	6.795.017.500,00	0,00	6.795.017.500,00	(6.795.017.500,00)	0,00
2	Dinas Kesehatan	432.910.000,00	0,00	432.910.000,00	(303.358.000,00)	129.552.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	867.659.995,00	0,00	867.659.995,00	(867.397.597,00)	262.398,00
4	Badan Penanggulangan Bencana	1.445.568.634,00	0,00	1.445.568.634,00	(1.445.568.634,00)	0,00
5	Dinas Perhubungan	47.795.000,00	0,00	47.795.000,00	(47.795.000,00)	0,00



No	Nama SKPD	Saldo Awal (Rp)	Bertambah (Rp)	Saldo Akhir Tahun 2023 (Rp)	Amortisasi	Nilai Buku
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	277.259.790,00	0,00	277.259.790,00	(212.670.966,00)	64.588.824,00
7	Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.200.800.000,00	0,00	2.200.800.000,00	(1.348.280.000,00)	852.520.000,00
8	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	270.113.000,00	104.000.000,00	374.113.000,00	(369.855.800,00)	4.257.200,00
9	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	330.527.500,00	15.000.000,00	345.527.500,00	(325.792.000,00)	19.735.500,00
10	Dinas Kelautan dan Perikanan	59.950.000,00	0,00	59.950.000,00	(59.950.000,00)	0,00
11	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	92.425.750,00	0,00	92.425.750,00	(62.588.950,00)	29.836.800,00
12	Dinas Peternakan	0,00	23.340.000,00	23.340.000,00	(4.668.000,00)	18.672.000,00
13	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	111.393.100,00	0,00	111.393.100,00	(91.431.180,00)	19.961.920,00
14	Sekretariat Daerah	480.662.000,00	0,00	480.662.000,00	(432.662.000,12)	47.999.999,88
15	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	0,00
16	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	866.855.000,00	0,00	866.855.000,00	(766.075.000,00)	100.780.000,00
17	Badan Keuangan Daerah	84.250.000,00	0,00	84.250.000,00	(78.250.000,00)	6.000.000,00
18	Badan Kepegawaian Daerah	728.894.904,00	0,00	728.894.904,00	(728.894.904,00)	0,00
19	Badan Penghubung Provinsi NTT di Jakarta	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	(5.000.000,00)	0,00
20	Inspektorat Daerah	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	(15.000.000,00)	10.000.000,00
21	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	47.000.000,00	0,00	47.000.000,00	(37.600.000,00)	9.400.000,00
Jumlah		15.174.682.173,00	142.340.000,00	15.317.022.173,00	(14.003.455.531,12)	1.313.566.641,88

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.19**.

Saldo Amortisasi Aset Tak Berwujud mengalami kenaikan senilai (Rp7.330.387.610,80) dari saldo awal senilai (Rp6.672.067.920,31) menjadi (Rp14.003.455.531,11) yang diperoleh dari penambahan beban Amortisasi tahun berjalan senilai (Rp2.107.242.677,06) dan koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi senilai (Rp5.224.144.933,74). Kenaikan Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud secara signifikan dikarenakan terdapat penyesuaian masa manfaat aset mengikuti dengan kebijakan akuntansi.

3) Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain **31 Desember 2023** **31 Desember 2022**
Rp338.126.806.131,20 Rp330.225.552.209,65

Saldo Aset Lain-Lain pada Tahun 2023 adalah senilai Rp338.126.806.131,20 mengalami kenaikan senilai Rp7.901.253.921,55 dari tahun sebelumnya yaitu Rp330.225.552.209,65. Aset Lain-Lain pada Pemerintah Provinsi NTT dapat dijelaskan sebagai berikut.

- a) **Aset Lain-Lain yang berasal dari Pengalihan Aset Tetap akibat Rusak Berat** yang ada di SKPD lingkup Pemerintah



Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp127.047.450.146,70 dengan Akumulasi Penyusutan Aset Lain Rusak Berat Senilai (Rp83.578.041.212,25).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.1.**

- b) **Aset Lain-lain yang dialihkan dari Aset Lancar** senilai Rp234.722.368,00 adalah Kas di Bendahara Pengeluaran yang terbawa dari Tahun 2013 pada 2 SKPD yakni Dinas Pendidikan senilai Rp64.408.243,00 dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif senilai Rp44.894.125,00 serta Kas pada Bendahara BOS yakni pada SMA Negeri 1 Malaka Timur senilai Rp125.420.000,00 yang terbawa dari Tahun 2017.

Kas yang dialihkan pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai dengan 31 Desember 2023 masih sementara proses pembayaran oleh ASN bersangkutan selaku Mantan Bendahara Pengeluaran Dinas sementara Kas senilai Rp64.408.243,00 merupakan sisa UUDP tahun 2012 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan senilai Rp93.658.243,00 yang telah disetor ke Kas Daerah tahun 2018 senilai Rp29.250.000,00 oleh ASN selaku Mantan Bendahara. Kas UUDP Tahun 2012 telah disetor Kas pada Bendahara BOS SMAN 1 Malaka Timur merupakan kas BOS yang hilang di sekolah dan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran masih berproses di Kepolisian.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.2**

- c) **Aset Lain-lain yang tidak Digunakan Pemerintah** senilai Rp600.776.000,00 yaitu Gedung Tambak Garam di Kabupaten Kupang.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.3**

- d) **Aset Lain-lain untuk Dihapus** senilai Rp3.748.172.950,00 merupakan aset yang akan dihapus karena telah diberikan kepada yang menerima yakni Gedung Direksi Kit pada Dinas Perhubungan dan Pendamping *Water Resources and Irrigation Sector Management Program* (WISIMP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dengan Akumulasi Penyusutan senilai (Rp21.171.150,00).

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.4**

- e) **Aset yang akan Diserahkan kepada Masyarakat** senilai Rp29.225.975.028,75 dengan rincian sebagai berikut.
- (1) Aset Peralatan dan Mesin (kendaraan) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT senilai Rp4.532.100.000,00;
 - (2) Aset Jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat senilai Rp9.864.901.278,75;
 - (3) Aset Tetap Tanah pada Biro Umum senilai Rp575.000.000,00;



(4) Aset Tetap Gedung dan Bangunan serta persediaan pada Dinas ESDM senilai Rp14.253.973.750,00, yang terdiri atas:

- (a) Persediaan PLTS tahun 2008 sampai dengan tahun 2016 senilai Rp12.200.232.250,00 yang belum teridentifikasi baik rincian maupun dokumen berita acara serah terima barang kepada masyarakat. Penyelesaian persediaan tersebut akan dilaksanakan tahun 2023 setelah dilakukan identifikasi beserta berita acara penyerahan/penghapusan persediaan; dan
- (b) Aset Gedung dan Bangunan senilai Rp2.053.741.500,00 yang akan diserahkan kepada masyarakat.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20 dan N.20.5.**

f) **Aset Lain-lain Lainnya** senilai Rp262.056.522.000,00 yang dapat dirincikan sebagai berikut.

(1) Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah Pemerintah Provinsi NTT yang dapat dirincikan sebagai berikut.

- (a) Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT yang dikuasai oleh PT New Badjo Beach yang berlokasi di Pantai Pede Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat, seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000. Pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang semula saldo awal senilai Rp5.868.405.000,00 namun tahun 2022 tanah atas aset tersebut telah dibeli senilai Rp500.001.000,00 pada Desa Uitiuhtuan, Kecamatan Semau Selatan - Kabupaten Kupang dan Desa Wolwal - Kabupaten Alor maka aset berupa Gedung/bangunan, peralatan dan mesin dan Jalan Jaringan dan Irigasi yang dibangun di atas tanah tersebut senilai Rp4.680.805.000,00 telah dialihkan ke jenis Aset berkenaan. Berdasarkan temuan BPK bahwa aset senilai Rp1.187.600.000,00 tersebut telah memiliki keputusan hukum untuk dikeluarkan dari inventaris Pemerintah Provinsi NTT sesuai Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 3068K/Pdt/2014. Namun, Pemerintah Provinsi NTT belum mengeluarkan karena akan melakukan upaya hukum luar biasa berupa Peninjauan Kembali (PK) atas keputusan MA tersebut, serta memiliki keyakinan akan mendapatkan bukti baru (Novum) untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) sampai dengan 31 Desember 2022 proses tersebut sedang dilaksanakan, sehingga aset tetap tanah seluas 29.690 m² dengan total nilai senilai Rp1.187.600.000 dikeluarkan dari KIB A dan direklas ke aset lainnya



sampai dengan ditetapkannya Keputusan Peninjauan Kembali (PK);

- (b) Pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah berupa aset dalam bentuk tanah yang dimanfaatkan sebagai penyertaan modal pada PT Semen Kupang tetapi belum diterbitkan Peraturan Daerah Penyertaan modalnya senilai Rp250.168.500.000,00. Aset Lain-lain Lainnya berupa tanah pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah yang dikerjasamakan dengan PT Semen Kupang melalui Penyertaan Modal Pemerintah Provinsi NTT, namun sampai dengan tanggal pelaporan dokumen berupa Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan Investasi Jangka Panjang Permanen oleh Pemerintah Provinsi belum diterbitkan. Sesuai LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019 Nomor: 73.a/LHP/XIX.KUP/06/2020 tanggal 17 Juni 2020, BPK mengungkapkan adanya pengakuan penyertaan modal berupa tanah Pemprov NTT pada PT Semen Kupang belum sesuai ketentuan. Kondisinya adalah terdapat tanah yang tercatat pada kartu inventaris barang (KIB) A Badan Pendapatan dan Aset Daerah seluas 4.119.330 m² atau 411,93 ha yang terletak di Alak dan Manulai, yang diperuntukkan untuk pembangunan pabrik PT Semen Kupang. Berdasarkan risalah rapat Umum Pemegang saham (RUPS) PT Semen Kupang tentang persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan tahun buku 2014 Nomor: 058/200.002/05.2015 tanggal 13 Mei 2015 diketahui bahwa, RUPS menyetujui pengalihan kepemilikan saham perseroan sebanyak 1.500. lembar atau 1,12% saham senilai Rp1.500.000.000,00 dari yang sebelumnya atas nama PT FL menjadi atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Risalah RUPS tersebut dituangkan dalam akta notaris yaitu akta pernyataan keputusan RUPS Nomor:111 tanggal 23 Juni 2016, yang memuat bahwa Pemerintah Provinsi NTT telah mengambil alih saham PT FL atas PT Semen Kupang.

Hasil analisis atas dokumen tanah yang terkait jelas dengan pemakaian lahan Pemprov NTT oleh PT Semen Kupang seluas ±1.029.500 m². Pada pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2020, Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi NTT masih menemukan bahwa dokumen Peraturan Daerah sebagai dasar pengakuan investasi jangka Panjang belum diterbitkan. Oleh karena



itu catatan atas tanah milik Pemprov NTT seluas $\pm 1.029.500 \text{ m}^2$ yang belum di catat pada KIB A dikategorikan sebagai aset Lain-lain - lainnya senilai Rp250.168.500.000,00 ($1.029.500 \text{ m}^2 \times \text{Rp}243.000,00$), dasar perhitungannya menggunakan NJOP tahun 2020; dan

- (2) Aset Lain-lain Lainnya berupa pendapatan Dana Bagi Hasil yang disalurkan secara nontunai melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) senilai Rp9.512.822.000,00 yang diperoleh dari fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang diakui berdasarkan Surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: S-220/KN.2401/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang Penyampaian Informasi mengenai Realisasi Penyaluran Tambahan Alokasi Dana Bagi Hasil ke Rekening TDF Tahun Anggaran 2023.

Rincian lebih lanjut lihat **Lampiran N.20, N.20.6, N.20.6.1 dan N.20.6.2**

2. KEWAJIBAN

Kewajiban

31 Desember 2023

31 Desember 2022

Rp1.195.417.144.551,08 Rp1.267.002.282.371,77

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pemerintah Provinsi NTT memiliki kewajiban jangka pendek berupa Utang Perhitungan Pihak Ketiga, Utang Bunga, Pendapatan Diterima Dimuka, Utang Belanja Upah Pungut (Insentif), Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD, Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Utang Bagi Hasil Pajak serta Utang kepada Lembaga Keuangan bukan Bank (PT SMI-PEN).

Total nilai Kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur senilai Rp1.195.417.144.551,08 dimana terdapat penurunan senilai Rp71.585.137.820,69 dari tahun sebelumnya senilai Rp1.267.002.282.371,77 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.87 Rincian Nilai Kewajiban

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Kewajiban Jangka Pendek	398.959.631.717,08	286.124.959.115,77	112.834.672.601,31	39,44
Kewajiban Jangka Panjang	796.457.512.834,00	980.877.323.256,00	(184.419.810.422,00)	(18,80)
Jumlah	1.195.417.144.551,08	1.267.002.282.371,77	(71.585.137.820,69)	5,65